



PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

*Lebih Dekat dengan Satu Klik*



## **TEKAN INFLASI DI PPU, MAKMUR RENCANA POTONG ALUR LOGISTIK**

**BACA HALAMAN 2-3**



**WARGA PATOK SISI  
JALAN, KADES SENAKEN  
SIAP CABUT JIKA  
MASUK WILAYAHNYA  
BACA HALAMAN 29**



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat memimpin rapat percepatan pengendalian inflasi daerah, Kamis (19/10/2023).

# Tekan Inflasi di PPU, Makmur Rencana Potong Alur Logistik

## Bawa Sayur saat Rapat dengan Inkoppas

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berencana memotong alur laut distribusi logistik yang masuk ke wilayahnya. Upaya ini ditempuh untuk menekan harga berbagai komoditas luar daerah yang dipasarkan di Benuo Taka.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengaku prihatin melihat harga-harga komoditi pasar yang dinilai cukup tinggi. Maka itu, ia berkomitmen untuk menemukan cara agar harga kebutuhan pokok masyarakat itu bisa ideal.

Dalam upayanya, ia berulang kali telah memanggil pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan itu. Mulai Dinas KUKM Perindag PPU, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan beberapa dinas lainnya.

"Saya berkali-kali ke pasar yang ada di Penajam ini. Saya lihat harganya lebih mahal, sayur, beras, minyak dan banyak lagi. Saya tahu, karena saya langsung ke pasar," ucapnya dalam rapat Percepatan Pengendalian

Inflasi daerah, Kamis (19/10/2023).

Bahkan dalam rapat bersama dengan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Jakarta itu, ia turut membawa beberapa produk sayuran yang baru dibelinya di Pasar Induk Penajam. Ia men-display-nya di atas meja tempatnya memimpin rapat.

"Saya bawa biar mereka semua melihatnya. Itu tadi pagi Saya beli, sekaligus Saya memonitoring harga di pasar," sebut Makmur.

Dari hasil evaluasinya selama sekira 3 pekan menjabat sebagai Pj Bu-

Kabupaten Penajam Paser Utara		Data Harga Oktober				
No.	Komoditas (Rp)	Okt 2023 (I)	Okt 2023 (II)	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
I	Beras					
1	Beras Medium (kg)	Rp 15,000	Rp 15,300	Rp 15,700	Rp 15,700	Rp 15,700
2	Beras Premium (kg)	Rp 14,000	Rp 14,150	Rp 14,400	Rp 14,400	Rp 14,400
II	Gula Pasir					
1	Gula Curah (kg)	Rp 16,000	Rp 16,400	Rp 17,000	Rp 17,000	Rp 17,000
2	Gula Kemasan (kg)	Rp 16,950	Rp 16,800	Rp 17,250	Rp 17,250	Rp 17,250
III	Minyak Goreng					
1	Minyak Goreng Kemasan (liter)	Rp 18,600	Rp 18,500	Rp 18,500	Rp 18,500	Rp 18,500
2	Minyak Goreng Premium (liter)	Rp 17,150	Rp 17,000	Rp 17,000	Rp 17,000	Rp 17,000
IV	Daging Ayam					
1	Daging Ayam Ras (kg)	Rp 23,000	Rp 23,000	Rp 23,000	Rp 23,000	Rp 23,000
V	Daging Sapi					
1	Daging Sapi (kg)	Rp 38,400	Rp 43,400	Rp 44,000	Rp 44,000	Rp 44,000
VI	Telur					
1	Telur Ayam Ras (kg)	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 160,000	Rp 160,000	Rp 160,000
VII	Kental Manis					
1	Susu Kental Manis (kaleng)	Rp 32,500	Rp 32,500	Rp 32,500	Rp 32,500	Rp 32,500
VIII	Susu Bubuk					
1	Susu Bubuk (400gr)	Rp 13,000	Rp 13,000	Rp 13,000	Rp 13,000	Rp 13,000
		Rp 44,500	Rp 44,500	Rp 44,500	Rp 44,500	Rp 44,500

ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

**Daftar harga berbagai komoditas pasar yang ada di PPU.**

pati PPU, ia memastikan penyebab tingginya harga komoditas pasar di PPU disebabkan panjangnya alur distribusi logistik. Tercatat, setidaknya perlu 3 pelabuhan di Balikpapan yang disinggahi kapal pengangkut barang sebelum masuk ke PPU.

“Stiap masuk pelabuhan, ada ongkosnya Rp 3 ribu sampai Rp 10 ribu per kilogram, baru masuk ke PPU. Ya jadi mahal harganya. Makanya itu yang masuk Saya potong, Saya pangkas. Jadi bisa langsung masuk ke PPU, dan harganya jadi lebih murah,” bebarnya.

Dari peta yang ditampilkan, setidaknya kapal logistik pertama kali masuk melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan. Kemudian ke Pasar Pandan Sari Balikpapan lalu ke Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan.

Setelah itu, barang-barang baru masuk ke PPU melalui Pelabuhan Ferry Penajam. Dalam setiap peralihan barang itu, setidaknya, harga barang meningkat dengan total sekira Rp 18 ribu per kilogram.

“Bagaimana tidak mahal jika seperti itu. Makanya yang saya rencanakan, barang itu bagaimana caranya langsung masuk ke PPU. Kita kan punya Pelabuhan Buluminung,

kenapa tidak langsung ke situ saja,” tegas Makmur.

Adapun dalam rapat kali ini, selain Inkoppas Jakarta turut pula dihadirkan perwakilan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan OPD terkait. Kemudian juga para agen-agen barang yang ada di PPU.

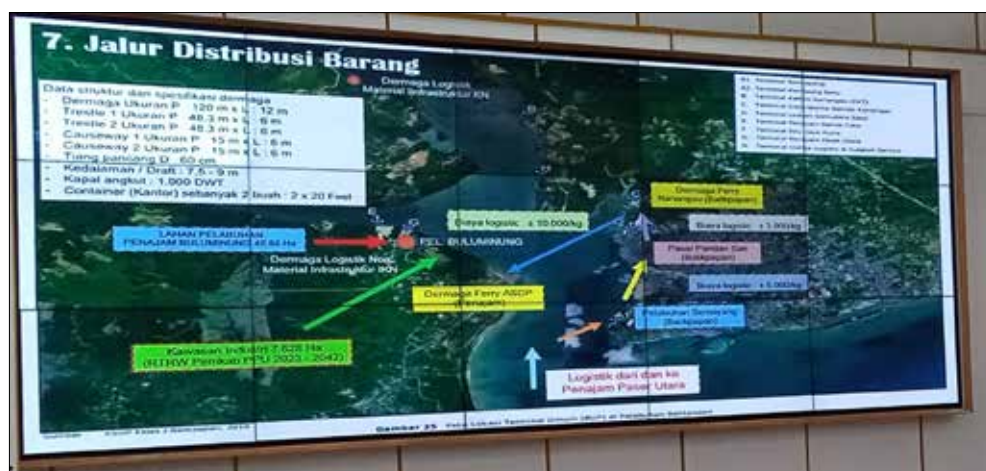
“Saya mau mereka menyampaikan apa permasalahannya, agar rencana itu bisa direalisasikan. Saya minta bantuan Inkoppas, Bulog dan para agen untuk bekerjasama,” ungkapnya.

Dari rapat itu, pengumpulan data kebutuhan berbagai komoditas di-

kumpulkan. Agar rencana pemangkasan alur distribusi barang ke PPU bisa diwujudkan.

Semua pihak menyepakati dan menyetujui rencana itu. Pundipastikan kerja sama dengan Inkoppas Jakarta dipastikan berlanjut, berperan sebagai pengepul beberapa barang itu.

“Saya juga dibantu oleh para agen, dan dipinjamkan gudang logistik ukuran 30 x 40 meter. Saya tidak bisa menarget, karena ini hal yang tidak mudah. Semoga rencana ini bisa cepat direalisasikan,” pungkask Makmur. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

**Peta alur distribusi logistik laut yang masuk ke wilayah PPU.**



HUMAS SETKAB PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun sattu memimpin rakor bersama OPD dan Forum TJSL PPU, Rabu (18/10/2023).

## Pemkab PPU dan Forum TJSL Komitmen Sinergikan Pelaksanaan Program CSR

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengharapkan ada sinergitas yang terbangun dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dengan pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di Pemkab PPU.

Pemkab PPU telah melakukan rapat koordinasi dengan Forum TJSL PPU, Rabu (18/10/2023). Lewat pertemuan ini, diharapkan sinergitas itu dapat terjalin dan berjalan dengan optimal.

"Saya di sini untuk melakukan sinergitas terkait bagaimana penanganan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini dan bagaimana keberadaan Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten PPU selaku penopang utama IKN," ucapnya.

Dalam rapat itu, dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian ada 15 perwakilan perusahaan di wilayah PPU yang tergabung dalam forum yang baru terbentuk akhir tahun lalu itu.

Makmur menyebutkan bahwa seluruh perusahaan yang ada di PPU tidak boleh hanya untuk men-

cari untung saja. Tetapi juga wajib memberikan perhatiannya dalam menyejahterakan masyarakat PPU.

"Pemerintah memang punya tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tapi tanpa didukung oleh stakeholder lain dan swasta, kemampuan Pemerintah Daerah terbatas," jelasnya.

Sementara itu, pelaksanaan TJSL atau biasa disebut corporate social responsibility (CSR) itu selama ini telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Hanya saja, pelaksanaannya tidak terpantau oleh pemerintah.

Padahal, dalam konteks pembangunan daerah, peran perusahaan dalam berkontribusi sangat penting. Terutama karena beberapa perusahaan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi PPU.

"Tinggal dalam hal pembangunan itu, pemerintah dan perusahaan perlu bersama-sama melihat, mana yang memang perlu dan tepat sasaran," ungkapp Makmur.

Sementara itu, Ketua Forum TJSL PPU, Dharma Saputra menyatakan

komitmennya terhadap program TJSL bersama dengan Pemkab PPU. Ia menekankan pentingnya fokus pada perusahaan areal terdekat perusahaan serta pemetaan spasial yang membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah tersebut.

"Memang fokusnya itu di ring satu perusahaan. Jadi kalau tadi misalkan disebut bandara VVIP, kami juga perlu memetakan secara grand spasial, apakah warga yang dimaksud itu memang masuk di ring satu perusahaan atau perusahaan jauh dari situ," terangnya.

Dharma turut memaparkan bahwa selama ini pelaksanaan program TJSL perusahaan yang tergabung dalam forum ini berjalan dengan baik. Pun dengan adanya forum dan rakor ini, pihaknya memastikan kedepannya pelaksanaan program akan lebih terarah dan sejalan dengan program pemerintah daerah.

"Dengan arahan Pj Bupati PPU tadi, memang ada irisan yang kita akui sudah diimplementasikan, maupun akan diimplementasikan," pungkaskannya. (ADV/SBK)

# Sikapi Peralihan Musim, BPBD PPU Susun RPKD dan Renkon Antisipasi Bencana Banjir

PPU - Oktober ini memasuki masa transisi musim yang sangat memengaruhi terjadinya perubahan cuaca ekstrem. Hal ini menjadi kesiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) dan menyikapinya dengan persiapan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Rencana (RPKB).

Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso menjelaskan terkini iklim memasuki musim penghujan. Tentunya ini menjadi perhatiannya, mengingat adanya potensi bencana banjir di wilayah PPU.

"Kami mengambil tindakan untuk membentuk dan menyatukan persepsi dengan perangkat daerah, yang terkait serta tugas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir dan lainnya," jelasnya usai memimpin rapat persiapan penyusunan dokumen RPKB, Kamis (19/10/2023).

Budi menjelaskan bahwa dengan adanya dokumen RPKB sekaligus dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) itu akan membantu perangkat daerah dalam mencegah dan mengantisipasi adanya bencana. Namun, dokumen-dokumen itu tentunya perlu tersosialisasikan dengan baik, agar setiap perangkat daerah dapat mengetahui tugas untuk menanggulangi bencana yang timbul.

"Kami akan memastikan dokumen ini tersosialisasikan dengan baik," ungkapnya.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

**Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso saat memimpin rapat bersama dengan instansi terkait, Kamis (19/10/2023).**

Selain itu, Budi mengharapkan dengan penyusunan bersama dokumen ini, seluruh perangkat daerah dapat mengambil peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sejalan dengan upaya preventif dan penanganan bencana yang dikerjakan BPBD PPU.

"Saya berharap ke depannya masing-masing perangkat daerah bisa memahami peranan dan tupoksinya masing-masing. Bagaimana menghadapi bencana banjir di depan mata yang sudah mulai terjadi," tutupnya. (ADV/SBK)

**Koran DIGITAL**  
**MEDIA KALTIM.com**  
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033

media\_kaltim | mediakaltimdotcom | mediakaltim.com | media kaltim



ISTIMEWA

RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang.

## Pekan Depan, RSUD AM Parikesit Jalani Akreditasi

**TENGGARONG** - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), akan mengikuti sertifikasi akreditasi, pada Senin (23/10/2023) pekan depan. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan, mulai dari karyawan hingga dokumentasi pemberkasannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar), dr Martina Yulianti, mengatakan persiapan sudah mencapai 95 persen. Karyawan,

dokumentasi, termasuk semua bukti pelaksanaan RSUD AM Parikesit menjalankan semua regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. "Hasilnya optimis peringkat terbaik, Insya Allah dapat terbaik," ujar dr Martina belum lama ini.

Dijelaskandr Martina, akreditasi yang akan menysar RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang ini, memastikan rumah sakit plat merah ini sudah menjalankan pelayanan kepada pasien yang sesuai standar Kemenkes.

Sejauh ini, RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang memang menyandang predikat akreditasi Paripurna. Peringkat tertinggi yang diberikan Kemenkes pada akreditasi yang dilakukan pada 2017 silam. "Saat ini sudah paripurna, paling tinggi untuk RS kelas B," tutup dr Martina. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i  
Editor : Nicha Ratnasari

# Dinkes Kukar Optimalkan Kuota PPPK untuk Tenaga Kesehatan

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendapatkan jatah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 2.999 orang. Terbagi untuk dua formasi, yakni untuk tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendidik atau guru.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, dr Martina Yulianti, memastikan akan memaksimalkan tenaga honorer bidang nakes asli Kukar. Dengan kata lain, nakes yang memang benar-benar bekerja di Kukar. Baik itu di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pusban) hingga di 3 RSUD milik Kukar. Yakni di RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang, RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (ABADI) Samboja.

"Kan formasinya 80 persen dari tenaga setempat (sudah mengabdikan di Kukar), dan 20 umum yang tidak bekerja atau belum bekerja di Kukar," ujar dr Martina.

Lebih lanjut, nakes yang dicari merupakan seluruh posisi nakes. Seperti perawat, bidan, dokter, dokter spesialis, ahli gizi dan beberapa posisi tenaga kesehatan (nakes) lainnya. Ketika berhasil lulus seleksi PPPK, maka akan langsung ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan di 20 kecamatan se-Kukar.

Tidak hanya itu, formasi PPPK ini pun diharapkan bisa mengurangi jumlah tenaga honorer sektor kesehatan di Kukar. Dan sesuai dengan keinginan Bupati Kukar, Edi Damansyah, untuk menyiapkan 1 perawat dan 1 bidan



ISTIMEWA

**Kepala Dinas Kesehatan Kukar, dr Martina Yulianti**

di seluruh desa di Kukar.

"Tapi jika tidak masuk dalam formasi PPPK, akan disupport dari BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa)," pungkash dr Martina. (adv)

*Penulis : Muhammad Rafi'i*

*Editor : Nicha Ratnasari*

# Rapat Bersama Dinsos, Kecamatan Muara Kaman Siap Gelar Peringatan Hari Pahlawan



ISTIMEWA

**Camat Muara Kaman, Barliang**

**TENGGARONG** - Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2023 mendatang, Kecamatan Muara Kaman ditunjuk sebagai tuan rumah di Kutai Kartanegara (Kukar). Kini, pemerintah kecamatannya pun sudah mulai secara bertahap melakukan persiapan. Salah satunya dengan menggelar rapat khusus bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kukar.

"Kami sudah rapat dengan tim di kecamatan, nanti akan ada rapat lagi di kabupaten bersama Dinsos," ujar Camat Muara Kaman, Barliang, Kamis (19/10/2023).

Rapat pembentukan pun diakuinya sudah dilakukan belum lama ini. Salah satu keputusannya akan memfokuskan acara Peringatan Hari Pahlawan, di Lapangan Bola Desa Muara Kaman Ulu.

Tidak hanya lomba saja, Kecamatan Muara Kaman akan menggelar sejumlah lomba. Seperti lomba balap perahu ces, lomba memasak yang melibatkan seluruh PKK tingkat desa hingga Beseprah. Yang akan berjalan selama sepekan penuh. "Kami sudah beberapa tahun melaksanakan Peringatan Hari Pahlawan di Muara Kaman," tutupnya. (adv)

*Penulis : Muhammad Rafi'i*

*Editor : Nicha Ratnasari*



ISTIMEWA

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin.

## Festival Seni Budaya Nusantara di Kecamatan Muara Badak, Hadirkan Jamrud Band

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), pastikan kembali menggelar festival musik kelas nasional di tanah Kutai. Bertajuk Festival Seni Budaya Nusantara, yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Badak, selama tiga hari. Yakni pada tanggal 20-22 Oktober 2023.

Dengan menghadirkan musisi ibu kota, Jamrud Band pada acara puncaknya. Yang akan menghentak penonton di Lapangan Kantor Camat Muara Badak. Dikombinasikan dengan musisi lokal asli Kukar.

"Insya Allah jika tidak halangan, akhir pekan ini kita kembali dihibur oleh band papan atas Indonesia,

Jamrud," ungkap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.

Rendi pun mengharapkan, festival ini kembali dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Terutama untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muara Badak. Sehingga diharapkan tidak hanya sukses acara saja, namun dirasakan benar manfaatnya oleh masyarakat yang berjualan di sekitar event.

"Tentunya ini untuk mewadahi UMKM, maka dari itu kami tetap minta kepada pengunjung untuk memborong usaha maupun dagangan masyarakat setempat," jelas Rendi.

"Dan, yang perlu saya tekankan lagi, agar semua yang hadir ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama, serta menjaga kebersihan," sambungnya.

Untuk diketahui, selain Jamrud, terdapat banyak penampilan lainnya yang akan mengisi Festival Seni Budaya Nusantara, di antaranya Kiki BP4, EQ Nusantara, Marco & Jessy, Be Reggae, Matteredmind, Lentara, Alusada, KKMSB, KKS, Toba Naulu, Marendeng, Moenari Art, Soul Art, dan PDKT. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i  
Editor : Nicha Ratnasari





Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Dra Nina Dewi M AP saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

## BPSDM Kaltim Gelar Evaluasi Pasca Latsar CPNS di Paser

**PASER** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK)

menggelar Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kyriad Hotel Sadurangas, Paser, Kamis (19/10/23)

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BPSDM Provinsi Kaltim dengan Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kabupaten Paser. Dalam acara ini juga turut menghadirkan 3 Pemateri yaitu Analis Pengemban-

gan kompetensi Ahli Muda, Dimas Radhitya Anggara, Widyaiswara Ahli Madya, M. Denny Syahrani dan Widyaiswara Ahli Muda, Yoyok Setyo Langgeng.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan kegiatan ini guna mengetahui perkembangan alumni pelatihan pasca mengikuti pelatihan dan sebagai pemenuhan data dan Informasi tentang implementasi atau penerapan pelatihan yang telah dilaksanakan.

"Evaluasi pasca diklat adalah salah satu fungsi dalam tahapan kontrol dalam suatu proses manajemen penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca pelatihan. Ini suatu kegia-

tan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pelaksanaan secara obyektif, reliable dan sah atau valid yang dilakukan setelah selesai proses pelatihan," ungkapnya.

Nina Dewi berharap melalui kegiatan ini para peserta tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat.

"Untuk para peserta diharapkan belajar dengan sebaik-baiknya dalam pelatihan ini. Semoga dari pelatihan ini para peserta tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Gedung tiga tingkat yang diperuntukan untuk ruang kelas pelatihan milik BPSDM Kaltim yang dipisahkan oleh taman yang sangat cantik.

## Mengintip Fasilitas Pelatihan di BPSDM Kaltim yang Dinilai Sangat Memadai

**SAMARINDA** - Guna memenuhi 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan ASN, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 24 JP, BPSDM Kaltim harus memiliki fasilitas yang memadai.

Salah satunya, untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya classical (tatap muka). Sehingga, mengharuskan para peserta menginap di Samarinda tempat pusat pelaksanaan pelatihan yang berada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPSDM Kaltim Samsul Qamar mengungkapkan, saat ini fasilitas yang dimiliki oleh BPSDM Kaltim dalam melaksanakan kegiatan pelatihan bisa dikatakan cukup memadai. Yakni, dengan jumlah fasilitas ruang belajar di 2 gedung terpisah dan ruang kelas berjumlah 9 ruangan kelas di masing-masing gedung. Kondisi ini dirasa masih cukup untuk melayani para peserta pelatihan selama ini.

"Kita memiliki 2 gedung untuk pelatihan, 1 gedung itu 3 tingkat dan 1 tingkatnya ada 3 ruang kelas. Jadi kali 3 tingkat artinya dalam satu gedung itu ada 9 kelas kali 2 gedung artinya ada 18 ruang kelas dengan kapasitas satu ruangan itu 40 orang," papar Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPSDM Kaltim Samsul Qamar

Sedangkan untuk asrama BPSDM Kaltim memiliki 4 gedung asrama. Setiap gedung ada 25 kamar dengan kapasitas tempat tidur berbeda pergedung. Gedung A dan B memiliki masing-masing 75 tempat tidur sedangkan gedung C dan D memiliki masing-masing 50 tempat tidur. Jadi secara keseluruhan fasilitas asrama memiliki 250 tempat tidur yang berada di 4 gedung asrama tersebut.

"Asrama kita ada 4 gedung, gedung A dan B satu kamar ada tiga tempat tidur, sedangkan untuk gedung C dan D

satu kamarnya dua tempat tidur, dan setiap gedung itu 25 kamar," jelasnya.

Oleh sebab itu untuk pemenuhan pelatihan untuk ASN se-Kaltim cukup bisa menampung asal terjadwal dengan baik. Pasalnya, setiap tahun ribuan ASN melaksanakan pelatihan di kompleks perkantoran BPSDM ini.

"Selama ini semua berjalan lancar, karena penjadwalan yang rapih. Pernah maksimal kita jalankan pelatihan itu empat kelas sekaligus, perkelas itu empat puluh orang, kita bisa melaksanakan kalau asramanya cukup," pungkasnya.

Diketahui, selain sarana pelatihan, di dalam kompleks perkantoran BPSDM ini, dinilai juga sangat lengkap. Ada kantin, ruang laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga seperti tempat fitness, lapangan mini soccer, lapangan bola basket. Selain itu juga ada dua gedung aula untuk mengelat acara, gedung poliklinik dan masjid Tarbiyatul Muttaqin. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari





Plh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Taufik.

## Tour Library Kaltim 2023, DPKD Bakal Kunjungi Wilayah Utara Kaltim

**SAMARINDA**-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), telah menetapkan tanggal pelaksanaan Tour Library 2023. Hal ini dikatakan langsung oleh Plh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim Taufik saat ditemui di ruang kerjanya.

"Iya kita sudah rapat dengan kabupaten dan kota yang terlibat, dan tetapkan tanggal penyelenggaraan Tour Library Kaltim tahun ini, yakni tanggal 13 November sampai 20 No-

vember 2023," ujarnya.

Tahun ini Tour Library Kaltim, jalur kunjungan tounya berbeda dengan tahun 2022 lalu. Jika tahun 2022 Tour Library Kaltim ke arah selatan Kaltim, kali ini ke arah Utara Kaltim.

"Tahun lalu kita ke arah selatan Kaltim, tahun ini kita ke Utara yakni kita mulai dari Samarinda, Bontang, Kutim dan terakhir ke Berau," ungkapnya.

Saat ini mobil perpustakaan keliling yang sudah disiapkan dari 10 kabupaten kota, sekitar 10 sampai

12 mobil perpustakaan keliling. "Kita akan melibatkan dalam Tour Library Kaltim 2023 ini sekitar 10-12 mobil perpustakaan keliling" tambahnya.

Dan untuk kegiatan semua tempat baik itu di kota atau kabupaten yang disinggahi semua sama, hanya tempatnya yang berbeda. "Untuk kegiatan semua sama cuma locus-nya yang berbeda," tutupnya. (ADV/Han/DPKD)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

# UMKM Berbasis Risiko Rendah Mendominasi di Kota Bontang

**BONTANG** - Setiap pembuatan usaha akan ada dengan kategori usaha berbasis risiko rendah hingga risiko tinggi. Oleh sebab itu verifikasi izin usaha juga akan berbeda-beda kepengurusannya.

Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah pemilik usaha hanya butuh mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian, usaha berisiko menengah di mana pelaku usaha membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar (SS).

Selanjutnya, usaha berisiko menengah tinggi yang memerlukan NIB dan SS yang harus menggunakan pernyataan mandiri kemudian diverifikasi lembaga pemerintahan daerah.

Terakhir adalah usaha berisiko tinggi

dengan memerlukan NIB melalui verifikasi melalui kementerian atau lembaga, atau pemerintah daerah beserta SS jika diperlukan. "Makin tinggi risiko usaha makin banyak verifikasi yang harus dilakukan," jelas Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

Di Bontang terdapat 15.563 sebaran proyek usaha dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Pertama, 10.256 dengan usaha berisiko rendah biasanya ini adalah UMKM. Kedua, 3.180 dengan usaha menengah tinggi seperti usaha konstruksi.

Ketiga, 1.317 dengan usaha berisiko menengah rendah hampir mirip dengan

menengah tinggi, namun surat pernyataan tidak memerlukan verifikasi. Dan terdapat 810 usaha dengan risiko tinggi seperti apotik yang Apoteker harus memiliki sertifikasi.

"Jadi sambil persiapan mengurus sewa toko, pegawai, kontrak supplier, mengurus izin apotek ke Kemenkes, kalau sudah keluar baru bisa berjalan," ujarnya.

Data ini dikeluarkan oleh Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sejak 4 Agustus 2021 hingga saat ini. (adv)

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Pihak DPMPTSP saat memaparkan materi kepada peserta.

## DPMPTSP Edukasi Warga Pentingnya Miliki Izin Usaha

**BONTANG** - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diundang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pelatihan keamanan pangan siap saji di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara.

Dalam kegiatan ini Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjadi narasumber untuk mengedukasi peserta yang hadir terkait pentingnya memiliki izin usaha.

"Karena ini tentang pangan siap saji yang merupakan usaha masyarakat,

tentu kami akan beritahu mereka tidak hanya berbisnis saja, tapi juga mendapatkan legalitas dalam bisnisnya," jelasnya saat ditemui, Rabu (18/10/23).

Adapun 5 alasan penting memiliki izin usaha. Pertama, usaha yang memiliki izin mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, usaha yang memiliki izin lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha.

Kemudian ketiga, akan lebih mudah ikut serta dalam tender. Keempat, usaha lokal yang memiliki izin

mendapat kesempatan mengembangkan usahanya ke tingkat internasional. Terakhir, kredibilitas usaha akan baik dan semakin mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan pemerintah.

"Tentu bakalan banyak keuntungan kalau usaha kita sudah memiliki izin, yang paling terasa pasti adanya kekuatan hukum, karena dengan hukum kita bisa menjaga usaha tetap pada ranahnya," ujarnya.

Adapun usaha berbasis risiko yang harus diketahui agar masyarakat yang ingin membuka usaha mengetahui risiko dari usahanya. (sya/adv)



YUSVA ALAM

Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan.

## Literasi Rendah, Pemkot Bakal Bikin Kebijakan Wajib Baca Buku

**BONTANG** – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyelenggaraan perpustakaan, Pemkot Bontang berencana membuat kebijakan wajib baca 3 buku dalam setahun bagi murid-murid SD dan SMP.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Pimpinan Rapat Kerja, Raking mengapa kebijakan wajib baca 3 buku setahun ingin dibuat. Hal itu untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat Bontang, khusus-

nya pelajar SD dan SMP.

Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bambang Cipto Mulyono saat ini tingkat literasi Bontang masih di angka yang sangat rendah. Karena itu untuk meningkatkannya, salahsatu upaya yang akan dibuat ada membuat kebijakan wajib baca 3 buku setahun.

“Bahkan kata pak kadisdikbud tadi, negara kita juga berada di urutan nomor 2 terakhir untuk tingkat literasi. Itu artinya rendah sekali literasi masyarakat kita,” ujarnya.

Karenanya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan tersebut, Kadisdikbud

mendukung sanksi yang akan diberikan bagi yang tidak mematuhi kebijakan yang akan dibuat tersebut.

“Di rapat itu kami bahas sanksi apa yang akan diberikan? Kemudian buku-buku seperti apa yang wajib dibaca?,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang ini.

Menurutnya, kebijakan ini memang sudah seharusnya dibuat. Lantaran jangan sampai beda menteri beda lagi kurikulumnya, beda lagi kebijakannya. Dengan raperda ini, perubahan apapun di kementerian tidak akan merubah kebijakan wajib baca buku. (al/adv)

# Kewenangan SMA/SMK di Provinsi, Disdikbud Tak Bisa Ukur Angka Putus Sekolah

**BONTANG** – Usulan untuk mende-sak pemerintah pusat agar kewen-gan SMA/SMK dikembalikan ke daerah kembali disuarakan Komisi I DPRD Bontang. Hal itu terungkap pasca Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penye-lenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, salahsatu dampak buruknya kewenangan SMA/SMK berada di provinsi adal-ah pemerintah kota (pemkot) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebu-

dayaan (Disdikbud) tidak bisa lagi mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah.

Dikatakannya, untuk bisa mengukur tingkat literasi dan angka putus seko-lah seharusnya sampai tingkat SMA/SMK. Karena kebijakan ini, maka dinas terkait hanya bisa mengukur sampai tingkat SD dan SMP saja.

“Kalau hanya mengukur SD dan SMP artinya tidak tuntas pengukuran tersebut. Sehingga sulit untuk jadi patokan,” ujarnya saat diwawancara redaksi usai rapat kerja bersama Dis-dikbud dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).

Ditambahkannya, dalam pembaha-

san raperda terkait penyelenggara per-pustakaan inipun, pihak-pihak terkait hanya bisa membahas penyelenggara perpustakaan di level SD dan SMP. Ti-dak bisa masuk ke ranah perpustakaan SMA/SMK. “Yang masuk di ranah pembahasan adalah perpustakaan SD, SMP, OPD, dan masyarakat. Kita tidak bisa membantu perpustakaan SMA/SMK karena terhalang kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Karenanya pihaknya kembali menyuarakan agar Pemkot Bontang mendesak pemerintah pusat, untuk bisa mengembalikan SMA/SMK ke pemerintah daerah. (al/adv)



YUSVA ALAM

Rapat kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023.

## Dewan Pertanyakan Kenapa Ranah Event BCC di Disdikbud Bukan Dispopar? Ini Jawabannya!

**BONTANG** - Komisi I dan II DPRD Bontang mengadakan rapat kerja terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023, Senin (16/9/2023) di Ru-ang Rapat Lantai II DPRD Bontang. Di rapat kali ini mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis-dikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.

Pimpinan rapat, Nursalam men-jelaskan, bahwa di rapat kerja ini komisi I dan II ingin mempertanya-kan mengapa anggaran BCC ini be-rada di Disdikbud, bukan di Dispopar yang seharusnya lebih sesuai untuk

menyelenggarakan event tahunan ini, lantaran dinas yang bergerak di bidang pariwisata.

“Kalau menurut kami BCC itu ber-hubungan dengan pariwisata, karena mendatangkan orang-orang untuk melihat event tersebut. Seharusnya ranahnya Dispopar karena bidang pariwisata, tetapi kok masuk di Dis-dikbud. Ini yang mau kami tanyakan,” beber Nursalam.

Dijelaskan Salam sapaan akrabnya, berdasarkan penuturan Kadisdik-bud, Bambang Cipto Mulyono, bahwa berdasarkan UU tentang kebudayaan

yang ada, salahsatu item budaya adalah seni. Sementara BCC itu lebih menonjolkan budaya-budaya seni. Sehingga berdasarkan UU tersebut, ranah event BCC masuk di Disdikbud.

“Andaikan kita punya dinas sendiri khusus bidang pariwisata dan kebu-dayaan, maka ranah penyelenggara BCC harus di dinas tersebut. Ken-apa di disdikbud? ya karena disana yang ada kebudayaannya saat ini,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Bon-tang itu. (al/adv)



Kontingen Cabor Layar Kaltim disambut perwakilan manajemen PT Berau Coal saat tiba di Bandar Udara Kalimantan, Kabupaten Berau usai bertanding sejak 7-17 Oktober 2023.

## Membanggakan, Kontingen Cabor Layar Berau Persembahkan 7 Emas dan Kunci Gelar Juara Umum Kejurnas serta Kualifikasi PON XXI/2024

**TANJUNG REDEB** - Atlet layar Kabupaten Berau kembali mengukir sejarah dalam dunia olahraga Indonesia. Sebab telah mengunci gelar juara umum dalam pagelaran Kejurnas Nasional (Kejurnas) dan Kualifikasi PON XXI Tahun 2024. Hal tersebut merupakan bukti nyata dedikasi, kerja keras dan latihan yang tak kenal lelah.

Diketahui, kontingen Cabang Olahraga (Cabor) Layar Kalimantan Timur memiliki 24 atlet yang seluruhnya berasal dari Bumi Batiwakkal.

Para atlet berhasil menorehkan 13 medali, diantaranya 7 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Keberhasilan itu pun memperkuat dominasi cabor layar Berau di kancah nasional.

Manajer Kontingen Cabor Layar Kaltim, Ida Nursanti menyebutkan

bahwa pencapaian luar biasa para atlet tidak datang begitu saja. Tentu harus melalui latihan yang sangat intens dan melelahkan.

Dijelaskannya, para atlet dibimbing oleh tim yang sangat berkomitmen. Mulai dari segi persiapan hingga pelaksanaan pertandingan yang berlangsung di Jakarta selama lebih dari satu minggu.

"Saat para atlet tiba, mereka langsung menyesuaikan diri, tim dan official langsung menjalankan tugasnya masing-masing," ungkap Ida saat tiba di Bandara Kalimantan pada Rabu (18/10/2023) lalu.

Kerja keras yang dilakukan para atlet berhasil mengantarkan mereka menduduki gelar juara umum. Tentunya hal tersebut adalah kelanjutan dari prestasi memukau mereka sebelum-

nya di PON XX Papua 2021 lalu, yang mana mereka juga berhasil keluar sebagai juara umum.

Ida mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini, "Alhamdulillah perolehan medali kita pada ajang kali ini lebih banyak dari PON 2021 kemarin," katanya.

Ia kemudian menceritakan perjalanan mereka di laut Jakarta, kondisi perairannya berbeda dengan Tanjung Batu, Kabupaten Berau. Meskipun sempat mengalami tantangan seperti terbaliknya kapal, kegigihan para atlet mampu menghadirkan hasil terbaik dan mengharumkan nama Bumi Batiwakkal sebutan Berau.

Kesuksesan ini juga tidak lepas dari dukungan PT Berau Coal, yang berperan sebagai "bapak angkat" cabang olahraga layar Berau. Melalui



Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) Berau, dukungan ini telah berlangsung sejak tahun 2000 dan telah membantu perkembangan atlet-atlet layar Berau hingga mampu bersaing dengan baik di berbagai ajang kompetisi.

Ida Nursanti lalu menyampaikan apresiasi kepada PT Berau Coal, "Saya sebagai manajer Layar Kaltim merasa peran Berau Coal sebagai bapak angkat terus hadir mendukung. Dan kami berterima kasih akan hal itu," ucapnya.

Salah satu atlet Layar Kaltim yang patut diperhatikan adalah Adit, yang baru berusia 13 tahun. Ia berhasil meraih medali emas pada kategori Optimis Putra untuk Kalimantan Timur dan Berau. Meskipun tubuhnya kecil, Adit membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan lawan dan menaklukkan laut Jakarta.

"Tidak ada rasa gugup, karena sudah berlatih sehingga saya cukup yakin, rileks, dan bermain seperti biasa saja," kata Adit singkat.

Adit mungkin terlihat pendiam, namun prestasinya dengan medali emas adalah hasil dari perjuangan kerasnya selama berlatih di Tanjung Batu.

Ada pula Adelia, atlet layar Kaltim berusia 15 tahun yang sukses meraih medali emas dalam nomor tanding Optimis Putri, membawa kegembiraan bagi Kaltim dan Berau. Meskipun dia terlihat agak malu, senyumnya menggambarkan kebahagiaannya.

Selain meraih medali emas, perjalanan pertamanya ke Jakarta kali ini merupakan suatu pengalaman berharga baginya. Ia mengaku melihat banyak kontingen dari daerah lain yang juga tampil hebat, namun itu tidak mengurangi semangat dan kemampuannya untuk menaklukkan laut Jakarta.

"Ada beberapa (yang tampil hebat), dari Kepulauan Riau hingga Sulawesi Selatan," imbuhnya.

Sementara, Corporate Communication Superintendent PT Berau

Coal, Rudini menyambut kedatangan kontingen Berau Kaltim dengan apresiasi yang tinggi.

"Perjuangan para atlet layar yang masih sangat muda begitu luar biasa dan patut kita apresiasi. Berhasil membawa pulang 7 emas merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan tentu semakin mengangkat nama cabor layar Berau dan Kaltim di kancah nasional," ungkapnya.

Ia juga menekankan komitmen PT Berau Coal terhadap dunia olahraga, "PT Berau Coal percaya, olahraga memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental masyarakat khususnya generasi muda serta mampu mengembangkan potensi bakat lokal. Oleh karena itu kita turut bangga dapat mengambil peran sentral dalam mengembangkan cabor layar Berau yang saat ini semakin unggul di nasional dan sudah beberapa kali meraih prestasi di kancah internasional," tandas Rudini. (adv/dez)





YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Ruang terapi anak yang ada di RSUD Bontang.

## RSUD Taman Husada Bontang Melayani Pasien Tumbuh Kembang Anak

**BONTANG** – Klinik Rehabilitasi medik RSUD Bontang kini telah melayani pasien tumbuh kembang anak. Namun sebelum dilakukan terapi tumbuh kembang anak, tetap harus mendapatkan rujukan dari dokter spesialis anak.

Dr Rahmawaty, Sp.KFR mengatakan rehabilitasi medik melayani pemeriksaan komprehensif untuk asesmen anak dengan kasus tumbuh kembang sehingga dapat memberikan terapi yang tepat dan sesuai.

“Pemeriksaan tumbuh kembang anak dimulai dari dokter spesialis anak. Apabila didapatkan masalah dan membutuhkan terapi maka akan dirujuk ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Setelah dilakukan asesmen tumbuh kembang anak dilakukan evaluasi kebutuhan dan rencana terapi yang tepat. Misalnya pada kasus yang kompleks seperti

down syndrome,” kata dr Rahmawaty saat ditemui Mediakaltim.com.

Selanjutnya, dr Rahmawaty mengatakan pada kasus tumbuh kembang anak akan diberikan terapi yang sesuai dengan perkembangan anak mulai dari motorik kasar, bahasa, motorik halus dan personal sosial.

“Asesmen bisa dilakukan tiap bulan untuk melihat perkembangan anak,” jelasnya.

Ia menjelaskan pasien anak yang datang untuk melakukan terapi tumbuh kembang mulai dari usia bayi hingga maksimal 17 tahun dan diberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

“Ketika terapi yang diberikan sudah memberikan hasil yang optimal untuk tumbuh kembang anak maka program terapi bisa dihentikan setelah dilakukan evaluasi,” katanya.

Waktu yang diperlukan untuk ter-

api tumbuh kembang anak dalam 1 sesi cukup lama yaitu sekitar 30-60 menit, dan juga disesuaikan dengan kondisi anak.

“Program terapi tumbuh kembang merupakan proses yang lama, ada yang sampai satu tahun hingga beberapa tahun. Tim kami di sini, selain saya sebagai dokter spesialis, ada terapis wicara, terapis okupasi dan fisioterapis yang menangani kasus tersebut,” ungkapnya.

Sementara untuk kasus tumbuh kembang anak yang paling banyak ditangani yakni non spesifik speech delay, ADHD, ASD, disabilitas intelegensi, global development delay. Dalam satu hari instalasi rehabilitasi medik ini dapat menangani sekitar 10-15 pasien tumbuh kembang anak. (adv)

Pewarta : Yahya  
Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

dr Rahmawaty Sp.KFR saat mendemonstrasikan terapi pasien di RSUD Bontang.

## Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Bontang, Berikan Layanan Terapi Pasien dengan Alat-alat Terbaru

**BONTANG** – Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan gerakan motorik atau sensorik.

Pada alur pelayanan, instalasi rehabilitasi medik melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, asuransi perusahaan maupun asuransi kesehatan lainnya. Untuk pasien sendiri harus melalui rujukan dari dokter utama sebelum dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik.

Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Bontang, dr Rahmawaty Dian, Sp.KFR menjelaskan rehabilitasi medik ini merupakan layanan yang memaksimalkan fungsi seperti pada bagian yang mengalami kelemahan di bagian tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

“Keluhananya kan’ kelemahan tubuh. Memaksimalkan fungsinya dengan cara meningkatkan ototnya yang tadinya lemah menjadi kuat seperti pada pasien penyakit stroke. Targetnya adalah meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pasien,” kata dr Rahmawaty Dian, Sp.KFR kepada Mediakaltim.com ditemui, Kamis

(19/10/2023).

Lanjut dr Rahmawaty dalam pelayanannya, rehabilitasi medik memaksimalkan fungsi gerak, fungsi komunikasi dan fungsi lainnya yang ada di tubuh manusia.

“Jadi layanannya kalau direhabilitasi harus diasesmen dulu oleh dokter spesialisnya. Kemudian melihat kebutuhan untuk terapi pasien hingga pemeriksaan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara,” jelasnya.

Kemudian, dr Rahmawaty mengatakan dalam sehari, rehabilitasi medik bisa melayani pasien 40 hingga 60 pasien setiap hari untuk dilakukan terapi medis. Untuk tim rehabilitasi medik sendiri terdiri dari 1 dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, 5 fisioterapis, 1 terapis okupasi dan 1 terapis wicara.

“Alat-alat terapi kita sudah bisa digunakan oleh semua kategori pasien. Banyak alat-alat terapi kita yang paling terbaru,” ungkapnya.

Dalam kasus yang paling banyak ditangani di RSUD, dr Rahmawaty mengatakan yakni kasus stroke, kasus Low Back Pain (LBP), kasus radang sendi hingga kasus tumbuh

kembang anak.

Dr Rahmawaty menambahkan tantangan yang sering dihadapi seperti pasien yang terbilang banyak dengan memaksimalkan SDM dan sarana yang telah ada. “Memaksimalkan tenaga SDM yang ada dan sarana yang ada, pasien tetap bisa kita layani,” terangnya.

Untuk kelengkapan alat sendiri, di klinik rehabilitasi medik selain ada alat-alat terapi misalnya alat Diathermy, Stimulasi Syaraf dengan Listrik melalui kulit (TENS), Ultrasound terapi, di RSUD Bontang telah dilengkapi juga dengan alat-alat terapi canggih seperti High Laser Therapy, Low Laser Therapy, Shock Wave Therapy (SWT).

“Harapan kami tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat sehingga semua pasien dapat memanfaatkan layanan yang dimiliki oleh RS ini,” pungkasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

## Minta Dishub Tegass, Awasi Truk Beraktivitas

**TANJUNGREDEB** - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti aktivitas kendaraan dengan bak terbuka yang bermuatan material tanpa penutup. Hal itu dinilainya mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenenteraman Masyarakat menyangkut aktivitas kendaraan mengangkut material dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan.

"Tetapi di beberapa ruas jalan yang ada, masih ada saya temui kendaraan dengan bak terbuka bermuatan material tanpa penutup dan materialnya mengotori jalan, ini harus segera

ditertibkan," ungkapnya.

Menurut Madri, material yang tumpah ke jalan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Seharusnya, seluruh hal yang ada dalam aturan bisa ditaati demi kenyamanan bersama.

Ditambahkannya, masih banyak sopir truk nakal dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Maka dari itu, Madri meminta pemilik usaha melengkapi terpal pada bak kendaraan terbuka sebagai penutup agar material yang diangkut tidak berhamburan di jalan. "Saya tidak melarang investasi. Tapi harus perhatikan juga muatan, dan itu ditutup," tegasnya.

Dirinya menegaskan, kendaraan yang mengangkut material jangan ugal-ugalan saat berkendara. Pas-

alnya, kondisi kendaraan sulit dikendalikan. "Muatan bahan material melewati jalan raya yang juga dilalui oleh masyarakat. Mereka tidak punya jalur khusus, karena itu kami harap pengemudi truk lebih pelan dan tidak bertindak ceroboh dalam mengemudi," imbaunya.

Kendati demikian, Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengharapkan para pengemudi dengan kendaraan bak terbuka tidak mengangkut orang, tujuannya demi keselamatan penumpang dan sesuai dengan peruntukannya. "Sekali lagi saya tegaskan, gunakan penutup, dan bisa saja Dishub menindak hal tersebut," tandasnya. **(adv/dez)**

# Marak Penggunaan Kompresor untuk Tangkap Ikan, Minta Pihak Terkait Rutin Lakukan Pemantauan

TANJUNG REDEB - Maraknya penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia menuturkan, penggunaan kompresor telah dilarang penggunaannya. Bahkan sudah tercantum dalam Undang-Undang. "Tetapi permasalahan ini akan dikaji ulang dulu. Karena bisa saja kegunaannya untuk hal yang lain," ungkapnya.

Saga tak menampik jika penggunaan kompresor dalam menangkap ikan sangat berbahaya. Tak hanya bagi perairan, tetapi juga untuk nelayan. "Apalagi ini sudah masuk dalam praktik destructive fishing dan dilarang oleh pemerintah," tegasnya.

Dipaparkannya, penggunaan kompresor juga melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. "Sehingga harus ditindak tegas, jika ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan kompresor," ujarnya.

Dirinya mengapresiasi masyarakat yang turut peduli dan tanggap dalam melaporkan kegiatan pelanggaran tersebut.



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

"Perlu rutin dilakukan pemantauan aktivitas bersama stakeholder dan pemangku kepentingan terkait. Dan perlu juga disosialisasikan, bahwa penggunaan kompresor dapat membahayakan," pungkasnya. (adv/dez)

# E-KTP Penting Keberadaannya, Dorong OPD Terkait Maksimal Terapkan Jemput Bola



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

TANJUNG REDEB - Perekaman E-KTP menjadi suatu langkah penting dalam administrasi kependudukan modern. Sehingga, Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mendorong OPD terkait memperhatikan persoalan tersebut.

Dia mengungkapkan, E-KTP merupakan kartu identitas resmi yang mencakup informasi penting tentang setiap warga negara. Keberadaannya pun penting dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena KTP digunakan untuk memilih, menerima layanan pemerintah, membuka rekening bank dan masih banyak lagi," terangnya.

Menurut Falen, OPD terkait harus maksimal dalam melakukan pelayanan jemput bola untuk melakukan perekaman. "Karena banyak perusahaan yang pekerjanya dari luar Berau tanpa mengantongi E-KTP. Maka dari itu, ini harus jadi perhatian," tuturnya.

Dirinya menyebut, jika sistem atau pelayanan jemput bola diterapkan OPD terkait dengan maksimal, maka dapat membantu masyarakat yang belum memiliki adminduk. "Kita harap Disdukcapil lebih masif melakukan jemput bola untuk membantu mereka yang belum memiliki e-KTP," ujarnya.

Politikus Demokrat ini berharap, pihak perusahaan dapat memberi fasilitas terhadap karyawannya yang belum memiliki E-KTP sebagai syarat melengkapi identitas diri.

"Bahkan ketika hendak berobat ke fasilitas kesehatan harus memiliki identitas seperti KTP ataupun Kartu Keluarga (KK). Maka semoga bisa menjadi perhatian bersama," tandasnya. (adv/dez)

## Pernah Dinobatkan Terbaik, Harap PSAD Kembali Raih Prestasi



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

**TANJUNG REDEB** – Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) yang berada di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur dibangun pada 2009 lalu dan pernah dinobatkan sebagai pasar tradisional terbaik di Indonesia, kini kondisi pasar tersebut justru membuat publik prihatin.

Menanggapi persoalan itu, Wakil ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengaku sangat prihatin dengan keadaan pasar terbesar yang ada di Bumi Batiwakkal tersebut karena sudah tidak seperti dulu lagi. "Saya lihat sekarang ini Pasar SAD sudah tidak tertata, serta infrastrukturnya juga sudah tidak bagus lagi," ungkapnya.

Selain itu, Syarifatul juga sangat menyayangkan Pasar SAD yang beberapa kali mencatatkan prestasi di tingkat nasional, namun beberapa tahun terakhir tidak ada pencapaian yang diraih.

"Sayang sekali, karena beberapa kali pasar kita itu dapat prestasi. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu kita mempertahankan penghargaan beberapa tahun berturut-turut, seharusnya kita lebih meningkatkannya lagi," ucapnya.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong kepada pengelola Pasar SAD untuk lebih memperhatikan kondisi dan fasilitas yang butuh perbaikan atau belum terpenuhi. Agar, dapat memberi kenyamanan kepada pedagang maupun pembeli.

"Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pasti penghargaan yang pernah diraih dapat kita capai kembali," tandasnya. (adv/dez)



LET'S  
GO  
BEYOND



# BOOKING THS SAJA

# BTS

## di Digizoom



Kode Promo  
**BTSOLI**

\*Syarat dan ketentuan berlaku

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNETIC  
SETIAP SERVICE BERKALA\*





THS Sama Lengkapnya  
Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan  
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!



AUTO 2000

member of ASTRA

Bontang



Suasana reses Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong di Kecamatan Segah.

## Reses di Segah, Kantongi Usulan Infrastruktur hingga Persoalan Lahan Sawah

**TANJUNG REDEB** - Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menggelar reses III di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah. Dia mengungkapkan, dalam reses tersebut ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya. Seperti ketersediaan air bersih, infrastruktur hingga persoalan lahan.

"Ada usulan agar ketahanan pangan menjadi perhatian, ketersediaan air bersih yang belum maksimal, sampai soal permintaan untuk pem-

angunan SMA. Semua aspirasi dari masyarakat ini saya catat dan akan saya tindaklanjuti nantinya, tentunya dengan solusi yang tepat," ujarnya.

Disebutkannya, persoalan lahan tersebut merupakan persawahan yang belum jelas peruntukannya seperti apa. Hal itu pun, kata Rudi menjadi PR bagi dirinya. "Karena lahan persawahan ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Maka dari itu, OPD terkait akan kami desak turun ke lapangan untuk mengkaji bagaimana lahan tersebut bisa di-

manfaatkan," jelasnya.

Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dirinya akan melakukan komunikasi bersama OPD terkait agar segera dicarikan jalan keluar terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

"Khusus untuk ketersediaan air bersih, saya rasa yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas intake, daripada harus membangun intake baru yang akan membutuhkan anggaran lebih besar," tandasnya. (adv/dez)

**radar.**  
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



[www.radaribukota.com](http://www.radaribukota.com) | [www.radarkutim.com](http://www.radarkutim.com)

[www.radarkukar.com](http://www.radarkukar.com) | [www.samarinda.com](http://www.samarinda.com)

[www.radarberau.com](http://www.radarberau.com) | [www.radar.paser.com](http://www.radar.paser.com) | [www.radarballkpapan.com](http://www.radarballkpapan.com)

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0853 4894 3982



**ibis**  
SAMARINDA

# GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

**Berlaku hingga 30 Desember 2023**

SCAN BARCODE  
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

 @ibishotelsamarinda  0811 - 551 - 6000

[all.accor.com](http://all.accor.com)



# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From <sup>Rp</sup>15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)





Pertandingan Liga2 antara Persipal Palu melawan Persiba Balikpapan yang berakhir dengan skor 2-2.

## Persiba Berhasil Tahan Imbang Persipal Palu

**BALIKPAPAN** - Tim kesebelasan Persiba Balikpapan berhasil mencuri satu poin dari saat menghadapi Persipal Palu dalam lanjutan Liga2 di Stadion Gawalise, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (19/10/2023) sore.

Anak asuh Nil Maizar hingga akhir babak kedua mampu bermain imbang 2-2. Padahal untuk peluang menang harusnya bisa terjadi. Namun, karena banyak keputusan wasit yang kontroversi, maka membuat Persiba Balikpapan harus puas bermain imbang.

"Seharusnya kita menang. Tapi karena kondisi dan situasi ya mau bagaimana lagi. Cuma satu, dalam tanda kutip kepemimpinan wasit harus dievaluasi," ujar Nil Maizar usai pertandingan.

Tambahan satu poin ini membuat Persiba kini mengoleksi 5 poin, hasil dari satu kemenangan dan dua hasil seri. Tambahan 1 poin sekaligus

membuat Persiba naik satu strip ke posisi 6 klasemen sementara Grup 4 Liga 2.

"Pemain saya ini bekerja sangat luar biasa. Tampil spartan. Saya puas dengan permainan. Harusnya kita menang," jelasnya.

Pada pertandingan tersebut, Persiba Balikpapan sejatinya tampil cukup apik dan unggul lebih dulu lewat gol Fauqa pada menit 8. Persiba bahkan mampu menambah keunggulan lewat gol Ardi Ardiana pada menit 17.

Tertinggal 2 gol, tuan rumah balik menekan dan mampu memperkecil ketinggalan dua menit berselang lewat gol yang dicetak Irvan Mofu.

Pada pertandingan ini, Irvan Mofu benar-benar menjadi momok lini belakang Persiba. Saat laga memasuki menit akhir, Irvan mencetal gol penyeimbang sekaligus membuyarkan kemenangan di depan mata Persiba.

"Kita syukuri aja hasil ini, dari pada

kalah. Harusnya kita menang. Saya bangga dengan anak-anak, progresnya bagus dari 6 pertandingan ini," tambah Nil.

Meski demikian bukan berarti dirinya tak melakukan evaluasi usai pertandingan ini. "Tapi banyak evaluasi yang harus kita lakukan. Dari bertahan ke menyerang. Kita terus berjuang dan kerja keras agar tim ini lebih baik lagi ke depannya," tutupnya.

Sementara bagi tuan rumah, tambahan 1 poin membuat Persipal Palu gagal mengukudeta PSBS Biak dari pucuk klasemen. Persipal kini mengoleksi 9 poin, terpaut 1 poin dari PSBS Biak yang mengumpulkan 10 poin.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Nicha Ratnasari*



## Shela Mahyudin Sebut Event Gelaran Anak Muda Harus Didukung Pemerintah

**KUTIM** - Bakal Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sheila Anggraini Sadewi Mahyudin, menilai event - event yang diselenggarakan oleh anak muda harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

Menurutnya, selain dapat memberikan hiburan kepada masyarakat dengan mengundang artis kenamaan, sebuah event dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Dengan mengadakan event berbayar dan mendatangkan artis-artis dapat menarik kedatangan masyarakat dari berbagai kota/kabupaten sehingga menghasilkan PAD

untuk pembangunan di daerah itu sendiri. Karena pajak yang ditarik dari tiket sebesar 20%. Selain itu dapat membantu UMKM yang ikut serta di dalamnya,” jelasnya kepada media ini.

Di Sangatta, Kutai Timur (Kutim), belum lama ini telah menyelenggarakan event musik dengan menghadirkan Denny Caknan. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat meskipun menggunakan tiket untuk menontonnya.

Dengan menggunakan tiket, maka ada kewajiban menyetorkan pajak hiburan kepada Pemkab Kutim. Hal ini sebutnya, bentuk kontribusi pemuda Kutim kepada PAD Kutim.

Ia pun meminta Pemkab Kutim untuk tidak menghamburkan angga-

ran untuk kegiatan seremonial, atau event hiburan. Menurutnya, Pemkab Kutim semestinya mengalokasikan anggaran untuk hal dasar yang dibutuhkan masyarakat. Sementara untuk event hiburan, dapat mempercayakannya kepada pihak ketiga khususnya anak muda.

“Pemkab Kutim itu suka menggunakan anggaran untuk membuat event memanggil artis ibu kota dengan gratis. Sedangkan masih banyak hal prioritas yang perlu dikerjakan dengan dana APBD salah satunya infrastruktur jalan yang rusak,” tandasnya.

*Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari*



Para finalis Duta Olahraga Kabupaten Paser 2023.

## Paser Kini Miliki Duta Olahraga, Ditarget Lolos Tingkat Provinsi

**PASER**- Atlet Takraw Putra, Bachryan Kiki Saputra (18) dan Atlet Menembak Putri, Sakinah Fitriah Sulzy Ramadhania (19) akhirnya terpilih sebagai Duta Olahraga Kabupaten Paser 2023, di Hotel Bumi Paser, Rabu (18/10/2023).

Terpilihnya kedua putra-putri Kabupaten Paser ini, setelah sebelumnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser melakukan pemilihan Duta Olahraga berdasarkan penjurian yang dilakukan kepada 13 atlet yang terdiri dari 7 perempuan dan 6 laki-laki.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporapar Kabupaten Paser, Arif Rahman menyatakan, pemilihan ini setelah belasan atlet itu menjalani masa karantina pada pemilihan Duta Olahraga Paser 2023 dalam pem-

bekalan berbagai materi tentang keolahragaan dan pengembangan diri.

"Tentunya momen penting ini untuk menggali betapa besarnya potensi anak muda di bidang olahraga, sehingga terpilih 2 dari belasan atlet ini sebagai duta olahraga," kata Arif.

Ia berpesan agar bisa sukses ke depannya, kuncinya terus menggali potensi, bakat dan kreativitas generasi muda. Meski dengan waktu yang singkat, kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan sukses

"Diharapkan duta olahraga yang terpilih pada malam hari ini dapat mewakili Paser di tingkat Provinsi mendatang," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Paser, Totok Sumardiono, mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan bahwa kompetensi olahraga khususnya olahraga prestasi akan maju.

"Ini merupakan cara untuk merespon atau paling tidak merangsang para atlet untuk lebih semangat lagi dalam mempersiapkan Porprov Kaltim 2026," kata Totok.

Untuk diketahui, Duta Olahraga ini salah satunya untuk menyukseskan program jangka panjang nasional 2021-2045, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Selain itu untuk memahami birokrasi di pengcab dan sampai ke pemerintah.

*Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari*



OPD terkait saat meninjau lokasi patok klaim warga.

## Warga Patok Sisi Jalan, Kades Senaken Siap Cabut Jika Masuk Wilayahnya

PASER - Jalan MT Haryono, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot kini ramai jadi perbincangan. Peralnya, seorang warga menutup bahu jalan menggunakan tiang kayu setinggi 4 meter, sejak Senin (16/10/2023) lalu.

Hal itu diduga lantaran warga tersebut mengklaim kepemilikan tanah dari sisi badan jalan, termasuk beberapa bangunan yang dekat dengan jalan tersebut. Akibat pemasangan tiang itu, aktivitas pengendara yang melintas terganggu.

Kepala Desa (Kades) Senaken, Supriyadi menyatakan, mulanya warga tersebut membersihkan area setempat. Namun tak lama dilakukan pemasangan tiang dan diklaim sebagai miliknya. Peristiwa ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

"Warga itu mengaku tanah yang di area tersebut semua adalah miliknya.

ya. Termasuk sisi jalan dan tanah di atas bangunan milik tetangganya," kata Supriyadi, saat dikonfirmasi, Kamis (19/10/2023).

Supriyadi menyebut, tetangga warga yang memasang tiang tersebut merasa dirugikan dan melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian Resort (Polres) Paser agar mendapat kejelasan hukum atas tindakannya.

Kendati begitu, sebelumnya persoalan tersebut sudah diadukan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Pihak kepolisian, dijelaskan Supriyadi, sudah pernah memediasi masalah tersebut, namun tidak masing-masing tidak bersepakat. "Sudah dilaporkan ke polisi, dilaporkan sama tetangganya juga," katanya.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah meninjau lokasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Supriyadi mengatakan, penyelesaian ini diupayakan selesai

secara persuasif oleh Kecamatan dan OPD terkait.

"Kami secara bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan persuasif dengan pihak terkait," Supriyadi.

Ia turut mengimbau agar para pihak tidak bertindak lebih selama persoalan ini di ranah pihak terkait untuk diselesaikan. Sementara itu, belum diketahui secara pasti terkait batas lokasi tersebut, lantaran beberapa kalangan menyebut lokasi tersebut masuk Kelurahan Tanah Grogot.

"Ini belum pasti juga apakah masuk Grogot atau Senaken. Sebenarnya kalau sudah masuk Senaken, saya akan cabut itu. Karena mengganggu aktivitas warga jadinya. Ini kan jalan ramai dilintasi," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor (tengah berkacamata) saat melaksanakan salah satu prosesi pembukaan Festival Nondo Adat Paser 2023, Rabu (18/10/2023).

## Apresiasi Festival Nondo 2023, Syahrudin; Terus Dipercantik sampai Masuk Agenda Nasional

PPU - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mengapresiasi gelaran Festival Nondo Adat Paser 2023. Bahkan ia mendorong pergelaran ini masuk dalam kalender pariwisata Nasional.

Ia turut hadir dalam pembukaan festival masyarakat Adat Paser di PPU yang digelar di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, Rabu (18/10/2023). Syahrudin mengikuti seluruh penampilan seni dan budaya yang ditampilkan dalam acara tersebut.

Menurutnya, penyelenggaraan rutin tiap tahun ini merupakan hal penting yang sudah seharusnya ada. Baginya ini menjadi momentum untuk mempererat suku bangsa yang ada di Benua Taka.

"Ini sudah menjadi agenda budaya rutin di kabupaten ini, yang memang sepatutnya ada sebagai perekat bangsa," ucapnya, Kamis (19/10/2023).

Festival Nondo Adat Paser 2023

ini digelar oleh Pemkab PPU melalui Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Budpar) PPU bekerjasama dengan Lembaga Adat Paser (LAP) PPU. Diadakan selama 4 hari, dimulai pada 18 sampai 21 Oktober 2023.

Festival Nondo kali ini bertema "Serapo Nusantara" yang berarti Serambi Nusantara. Tema ini selaras dengan keragaman masyarakat yang heterogen, gambaran geografis wilayah yang memiliki beragam potensi dan khasanah daerah.

Festival Nondo adalah gelaran ritual adat yang dilaksanakan setiap tahun oleh suku Paser di PPU. Nondo merupakan ritual bersih-bersih kampung yang sejak dulu dilakukan oleh leluhur suku Paser, agar diberikan keselamatan, kesejahteraan bagi masyarakat.

Sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka Festival Nondo Adat Paser 2023 ini juga digelar antara lain ada parade budaya festival kuliner

nusantara, festival kuliner tradisional, festival seni dan budaya yang akan digelar setiap malam.

Ada juga pawai budaya, pameran UMKM yang diikuti oleh seluruh organisasi wanita dan pelaku UMKM di Kabupaten PPU dan sejumlah kegiatan lain yang akan ditampilkan di sana selama festival ini berlangsung.

Syahrudin menyebutkan festival ini ke depannya perlu terus ditingkatkan. Agar nantinya masuk sebagai event Nasional.

Oleh karena itu, Pemkab PPU melalui dinas terkait perlu untuk menempuh upaya serius dalam mendukung penyelenggaraannya. "Harapannya, kegiatan ini bisa mempercantik lagi kontennya. Karena saya melihatnya tadi, ada beberapa yang perlu penataan. Sehingga nanti ke depannya bisa lebih baik," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi  
Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

**DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE**

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

**SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN**  
\* TOYOTA MOTOR OIL

**Khusus Taxi Online & Travel**

**GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE**

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang

# MEDIA KALTIMTARA

JUMAT,  
20 OKTOBER  
2023

.COM

PASANG IKLAN  
HUBUNGI:  
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

## RSD DR SOEMARNO SOSROATMODJO JALANI SURVEI AKREDITAS

BACA HALAMAN 2-4



## PETUGAS LAPAS TARAKAN LAKUKAN TES URIN DAN RAZIA KAMAR

BACA HALAMAN 11



Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. H. Soemarno Sosroatdmojo, Tanjung Selor dilakukan survei peningkatan akreditasi.

RSD dr Soemarno Sosroatmodjo Jalani Survei Akreditasi

# Komitmen Berikan Layanan Terbaik untuk Masyarakat

TANJUNG SELOR - Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. H. Soemarno Sosroatdmojo, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tengah menjalani survei akreditasi. Survei dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien.

Bupati Bulungan, Syarwani serta wakil Bupati, Ingkong Ala terpantau ikut serta hadir mendampingi tim akreditasi.

Dikonfirmasi usai melakukan tinjauan itu, Bupati Bulungan, Syarwani

mengungkapkan survei yang dilakukan oleh tim, mengacu pada amanat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2020, tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Dikatakan, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko, dilaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga, dapat terciptanya pelayanan yang mutu dan berkualitas. "Indikator penilaiannya banyak. Salah satunya, soal penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yaitu, satu Rumah Sakit Umum Daerah wajib tersertifikasi akreditasi Nasional," ungkapnya.

Dan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang berkualitas, Syarwani berharap manajemen RSD dr. H. Soemarno Sosroatdmojo untuk ditingkatkan. Yaitu, terapkan prinsip keselamatan pasien, bersikap profesional sehingga bisa mencapai status akreditasi melalui tahapan dan ketentuan berlaku.

"Saya pikir ini menjadi tugas bersama seluruh perangkat daerah, termasuk RSD untuk terus berinovasi dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Utamanya, dalam meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan," jelas Syarwani.



Dia katakan, komitmen pemerintah ddaerah terpenting bagaimana memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Senada diungkapkan oleh Humas RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo, Heriyadi Suranta bahwa survei akreditasi berlangsung selama tiga hari ke depan.

Dimulai pada 12 Oktober, dan dilanjutkan pada 18-19 Oktober 2023. Pasalnya, survei pertama dilakukan oleh

tim survei secara virtual atau melalui jaringan.

“Sementara di hari kedua dan ketiga, dilakukan penelusuran lapangan. Hal ini untuk membuktikan dan memastikan langsung aplikasi, pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh rumah sakit,” jelas Heriadi, sa-paan karibnya.

Heriadi melanjutkan, semua yang dilakukan tetap berpedoman pada

standar dan prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan oleh semua staf, mulai dari pimpinan hingga pelaksana. “Kita berkomitmen untuk terus berikan pelayanan yang mutu, berkualitas untuk keselamatan pasien,” tandasnya. (tin/and)

*Editor: Andhika*



Beberapa alat medis yang baru didatangkan ke RSD dr Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor.

## Infrastruktur di Bidang Kesehatan Dioptimalkan

**TANJUNG SELOR** – Pemerintah Kabupaten Bulungan, memiliki program untuk peningkatan infrastruktur dasar, salah satunya pada bidang kesehatan.

Untuk mencapai itu, maka diperlukan dukungan infrastruktur pelengkap untuk menjawab kebutuhannya pada aspek kesehatan bagi masyarakat, utamanya di Kabupaten Bulungan, Kaltara.

Direktur RSD dr Soemarno Sos-

roadtmojo, dr Widodo saat dikonfirmasi menjelaskan, kelengkapan infrastruktur kesehatan tengah dipersiapkan. Hal ini, kata dia sejalan dengan misi Pemkab Bulungan, yaitu memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama, dalam pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat.

“Ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan prima bagi

masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujar dr Widodo, kala dikonfirmasi oleh media ini, Kamis (19/10/2023).

RSD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, kata dia, telah meningkatkan layanan kesehatan dengan pengadaan alat radiologi dengan mendatangkan CT Scan 200 Slice. Saat ini, telah dilakukan uji fungsi untuk operasi sembari menunggu perizinan.

Selain itu, alat kesehatan yang baru didatangkan berupa mammografi, alat kesehatan ini berfungsi sebagai diagnostik untuk mencari tahu penyebab munculnya keluhan atau perubahan pada kondisi payudara, seperti nyeri, benjolan, termasuk perubahan warna kulit. Selain itu, juga untuk meningkatkan pelayanan pada bidang cancer, saat ini telah memasang oksigen generator.

“Oksigen ini bisa mengisi 60 tabung dalam satu jam lebih, dan siap dimanfaatkan di ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi pasien,” tukasnya.

Mesin ini, kata dia, berkapasitas 500 liter per menit (LPM) telah dapat dioperasikan untuk memproduksi gas medis yang menjadi kebutuhan vital pasien yang dirawat. Disamping itu, jika berbicara soal keterpenuhan tempat tidur atau bead bagi pasien, kata dia jumlah yang ada saat ini sekitar 229 ranjang. “Jumlah itu untuk rumah sakit tipe B, telah memenuhi standar,” bebarnya.

Sedangkan, untuk jumlah tenaga spesialis per tahun 2023 berkisar 29



orang. Dua orang diantaranya sub spesialis, dan ada yang tengah menjalankan pendidikan spesialis.

“Total SDM kita saat ini sebanyak 621 orang, terdiri dari dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan,

dan tenaga kesehatan lainnya,” tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika





Ketua DPRD Bulungan, Kilat mendorong pemerintah daerah terapkan kebijakan pusat dengan bijaksana.

## Soal Penghapusan Honorer, DPRD Minta Dipikirkan dengan Matang

**TANJUNG SELOR** - Rencana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tahun 2023, mendapatkan komentar dari beragam pihak.

Ketua DPRD Bulungan, Kilat meminta pemerintah daerah sebelum kebijakan itu dikeluarkan, terlebih dahulu harus dipikirkan bagaimana nasib para honorer di Bulungan.

"Kita mendorong pemerintah daerah, dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat, perlu juga dipikirkan nasib para honorer. Karena, jangan sampai ketika ini diterapkan menimbulkan kontroversi dan dampak sosial seperti gangguan dan lain-lain," ucap Kilat, kala dikonfirmasi oleh media ini, Kamis (19/10/2023).

Politikus Gerindra ini meminta solusi yang diambil oleh pemerintah

bisa dilakukan beragam cara. Misalnya melalui outsourcing atau pihak ketiga ataupun dengan cara lain, yang pada intinya tidak memberatkan sebelah pihak.

Disamping itu, penghapusan tenaga honorer ini, perlu dipertimbangkan juga dengan dampak langsung terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah.

"Ditengah kekurangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) peran dari pada tenaga honorer ini, saya pikir dibutuhkan. Jika kemudian kebijakan ini diterapkan, apakah tidak mengganggu dengan pelayanan pemerintah," saran dia.

Hal lain, yang mesti dipikirkan adalah nasib tenaga honorer. Oleh karenanya, dewan tak hentinya mengingatkan pemerintah daerah supaya dalam menerapkan kebijakan ini harus dipertimbangkan sisi keamanan daerah, kondusifitas terma-

suk nasib para tenaga honorer yang harus menghidupkan rumah tangga anak dan istrinya.

"Kami minta pemerintah daerah, pertimbangkan kebijakan itu dengan matang. Karena pasti menimbulkan masalah, karna tidak sedikit orang yang menggantungkan nasibnya sebagai tenaga honer, belum anak dan istrinya, apakah ini tidak menimbulkan masalah," jelas Kilat mempertanyakan.

Olehnya itu, DPRD Bulungan kembali menyarankan supaya itu dipikirkan dengan matang dan terapkan kebijakan dengan bijaksana. Jangan sampai, terjadi pengurangan besar-besaran yang berimbas pada terganggunya pelaksanaan birokrasi dan pembangunan daerah. (tin/and)

*Editor: Andhika*



Bupati KTT, Ibrahim Ali saat membuka launching IPLT di Gedung Pendopo Djaparuddin, Jalan Padat Karya, Tideng Pale.

## Perbanyak IPLT Wujudkan KTT Bersih

TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT), perlahan merealisasikan beberapa program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Salah satu program yang tertuang dalam 9 misi pemerintah daerah, berupa mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu, tata ruang wilayah. Berbicara infrastruktur dasar, salah satu yang menjadi titikfokus pemerintah daerah berupa merealisasikan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), tangki septik individual dan pengelolaan air limbah domestik.

Bupati KTT Ibrahim Ali, menekankan hal penting mengapa IPLT dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat itu penting, sebagai wujud realisasi dari program dan rencana pembangunan daerah.

“Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat dan ketersediaan air bersih. Dan pengolahan air limbah

domestik sebagai wujud KTT ADA,” ungkap Ibrahim Ali, Rabu (18/10/2023).

Pemkab Tana Tidung, Kata Ibrahim memiliki langkah bersama secara simultan mengurangi angka open defecation free (ODF), yang merupakan suatu kondisi masyarakat telah melakukan sanitasi total, yaitu dengan tidak buang air besar sembarangan.

“Untuk meminimalisir itu, cara pemerintah salah satunya dengan terus melakukan pembangunan sanitasi masyarakat, yang bersumber dari dana alokasi khusus, bidang sanitasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” tuturnya.

Pada tahun 2021 lalu, pemkab Tana Tidung telah membangun tangki septik skala individual, pada dua Desa, yaitu Bebatu dan Badan Bikis. Kemudian, tahun 2022, telah dibangun pada 7 lokasi, diantaranya Tideng Pale, Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebawang, Seludau, Sesayap, dan Desa Sepala Dalung.

“Jumlah tangki septik skala individual yang telah direalisasikan, kurang lebih sekitar 120 unit,” tuturnya.

Pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran dari instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT), oleh pemerintah dalam upaya memberikan kehidupan yang sehat bagi warga masyarakat.

“Program ini, juga ada kaitanya dengan misi pemerintah daerah berupa mewujudkan masyarakat KTT sehat,” jelas Ibrahim.

Instalasi pengolahan lumpur tinja, kata dia telah selesai dibangun pada tahun 2018, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Mengetahui operasional dalam pembangunan, sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, demi kemasalahatan dan mewujudkan kesehatan bagi masyarakat,” tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati KTT, Ibrahim Ali saat menghadiri pelantikan pejabat administrator, pengawas, pengawas sekolah, kepala sekolah dan jabatan fungsional.

# ASN Harus Patuh Pada Ikrar dan Sumpah Janji Saat Dilantik

**TANA TIDUNG** - Pemkab Tana Tidung, kembali melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan jabatan fungsional lainnya.

Pelantikan tersebut, dihadirkan langsung oleh Bupati KTT, Ibrahim Ali. Dikesempatan itu, Ibrahim memberikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik.

"Selamat atas telah dilantikannya pejabat administrator, pejabat pengawas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan jabatan fungsional. Saya berharap, jabatan baru tersebut dapat diemban dan dijalankan dengan rasa tanggungjawab," ujar Ibrahim Ali, kepada seluruh ASN yang telah dilantikannya beberapa waktu lalu.

Peran pejabat di lingkungan Pemkab Tana Tidung, kata Ibrahim memiliki andil dalam menopang pembangunan daerah yang lebih baik. Kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, demi terciptanya pemerintahan yang baik atau good governance.

"Kita harus bersama-sama berkontribusi, untuk mewujudkan KTT yang bermartabat, sejahtera, indah dan humanis," jelas Ibrahim.

Orang nomor satu di KTT ini, berpesan pelantikan jabatan tersebut kiranya menjadi penghayatan bersama, dengan penuh tanggungjawab

untuk mengabdikan pada negara. Sehingga dengan begitu, spirit untuk membentuk pribadi menjadi Abdi Negara dapat terbentuk serta sadar akan amanah yang diemban. "Menjalankan tugas dengan rasa penuh tanggungjawab, jika sadar akan amanah itu, saya yakin dan percaya tidak akan ada celah untuk berbuat ingkar terhadap ikrar yang telah diucapkan, sesaat dan setelah menjadi ASN," tuturnya.

Ibrahim menegaskan, soal ikrar yang diucapkan Tuhan Yang Maha

Esa menjadi saksi atas ucapan dan ikrar janji yang diucapkan, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

"Semoga para pejabat yang baru dilantik, dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Menjadi team work yang tangguh dan kompak serta dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik agar terwujudnya Tana Tidung yang bermartabat, sejahtera, indah dan humanis," harapnya. (tin/and)

*Editor: Andhika*





ADE/MKR

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, Ajat Jatnika.

## Januari hingga September 2023, Realisasi Fisik PUPR Tarakan Capai 80,6 Persen

**TARAKAN** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mengungkapkan realisasi fisik sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai 80,06 persen. Dari total anggaran di tahun 2023 sebesar Rp 258 miliar

“Realisasi fisik per akhir September 2023, sudah mencapai 80,6 persen,” ucap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, Ajat Jatnika saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/10/2023).

Realisasi tersebut terdistribusi ke dalam tiga bidang, yakni Bina Marga, Cipta Karya, dan Pengairan dan Sumber Daya Air. Dijelaskannya, Bina Marga meliputi pembuatan dan pemeliharaan jalan. Sementara bidang Cipta Karya meliputi pembangunan

gedung. “Salah satunya TACC di belakang Masjid Islamic Center,” katanya. Selanjutnya, di bidang Pengairan dan Sumber Daya Air meliputi pembangunan drainase dan lain sebagainya.

Menurutnya, capaian realisasi saat ini sudah sesuai target. Kendati demikian, dia ingin memaksimalkan realisasi yang tersisa di tiga bulan terakhir ini.

“Saya pikir ini masih on the track sehingga dirasa tidak perlu terlalu upaya ekstrim dan masih ada tiga bulan. Insyaallah terpenuhi,” jelasnya.

Dia menuturkan, jumlah anggaran saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya tak jauh berbeda. Setiap pengerjaan proyek pembangunan, lanjutnya, PUPR rutin berkoordinasi

dengan tim di lapangan. Koordinasi ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

PUPR, kata dia, berkomitmen mendukung program dan visi misi Kota Tarakan mewujudkan Smart City. “Yang jelas PUPR mengerjakannya mengikuti dengan visi misi Pak Wali Kota Tarakan di sektor ke PU an,” tegasnya. Dia menjamin anggaran terserap secara efektif dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR ADE/MKR

Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting.

## Tarakan Targetkan Angka Stunting Turun

TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan menargetkan pada akhir 2023, angka stunting turun hingga di bawah 13 persen dari yang sebelumnya 15,6 persen.

“Update kemaren 15,6 persen. Kita harus turun di bawah 13 persen. Mudah mudahan audit yang hasilnya keluar di November 2023 bisa turun,” ucap Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto, Kamis (19/10/2023).

Effendhi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Tarakan mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan Effendhi, bahwa stunting merupakan masalah serius yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak.

Dalam hal ini, Wawali telah memimpin berbagai upaya dan kegiatan yang berfokus pada penurunan angka

stunting di Kota Tarakan. Salah satunya melalui program Bapak Asuh.

Dijelaskannya, Bapak Asuh merupakan program hasil kerja sama dengan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembangnya.

Keterlibatan Bapak Asuh, menurutnya, bisa membantu menganggarkan pemberitan makanan tambahan pada keluarga risiko stunting. “Tahap pertama kita bantu peningkatan gizinya. Setelah punya penghasilan sendiri, mereka tidak lagi bergantung. Kalau pun tidak ada pekerjaan, sebisa mungkin kita beri pekerjaan,” katanya.

Keterlibatan sebagai Bapak Asuh anak stunting, diperlukan baik korporasi, lembaga dan perorangan. Di Tarakan, Bapak Asuh sudah melihatkan berbagai intansi vertikal seperti BUMN. “Ada Pelindo, Pertamina,

Bank Indonesia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut,” ucapnya.

Effendhi Djuprianto tak menampik ada beberapa wilayah di Tarakan yang angka stuntingnya masih tinggi yakni Tarakan Timur dan Tengah. “Ter tinggi saat ini Sebengkok, Tarakan Timur ada Amal, ungkapinya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data prevalensi stunting per Maret 2023, Sebengkok merupakan wilayah penyumbang kasus stunting tertinggi di Kota Tarakan dengan total 141 kasus. Kemudian Puskesmas Juata 124, lalu Puskesmas Gunung Pantai Amal 106, Puskesmas Karang Rejo 100, dan terakhir Puskesmas Mambrungan 93. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



SUMBER FOTO : INFOINDO

Aksi damai yang dilakukan pekerja di depan Gedung DPRD Tarakan.

## Curhat Pekerja Subkontraktor PRI, Ngaku Dipecat Usai Lakukan Aksi Damai di DPRD Tarakan

**TARAKAN** - Sejumlah Pekerja mengaku dipecat usai melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Tarakan pada Kamis (12/10/2023) lalu. Mereka mengaduhkan dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor PT Phoenix Resources International (PRI). Diketahui empat subkontraktor PRI tersebut antara lain PT MAS, PT SJI, PT Xirui dan PT Shandong.

Basran, salah satu pekerja dari PT Mitra Agung Solusindo (MAS) yang harus menerimanasiblantaran dipecat secara sepihak. Dia menyebut selain dirinya, ada 30-an pekerja dari sejumlah sub kontraktor yang juga dipecat secara sepihak.

Basran mengungkapkan ada beberapa poin yang dia sesalkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama, kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menurutnya dicampuradukkan dengan tenaga harian lepas. Kedua persoalan pekerja yang dipecat secara sepihak tanpa adanya surat peringatan ataupun surat pemutusan kontrak kerja. Kemudian ketiga, dipecatnya pekerja lokal Tarakan dan digantikan pekerja dari luar daerah.

"Pengangguran di Tarakan masih banyak, itu kami sayangkan," ujar Basran, Selasa (17/10/2023).

Selain itu, menurutnya, fakta di-

lapangan menunjukkan masih banyak TKA China bekerja bukan pada keahlian khusus. "Sekelas helper, mencangkul dan menyekop. Artinya tidak sesuai kualifikasi distandardkan negara. Kami ingin aturan masuknya TKA China ditegakkan," harapnya.

Bicara masalah kontrak PKWT, di dalamnya mencakup masalah gaji, upah dan jam kerja, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk jam kerja, dia mengakui bekerja dari pukul 06.30 sampai 18.30 Wita.

"Ataupun terjadi addendum perubahan, pukul 07.00 WITA masuk, pulang 18.30 WITA. Dan tetap terhitung 11,5 jam kerja atau actual kerja 9 jam dengan istirahat 2 jam, itu di luar dari ketentuan peraturan perusahaan nomor 35 Tahun 2001 pasal 21 ayat 1 bagian a dan b," paparnya.

Kemudian, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak juga dialami pekerja. Menurutnya, seharusnya jika ada PHK, harus disertai alasan yang seharusnya menyebabkan ada indikasi dilakukan pemutusan kerja. Seperti melakukan pemukulan ataupun pelecehan.

"Tapi ini tidak ada. Kemarin kami aksi hanya damai musyawarah kepada sub kontraktor dan owner dalam hal ini PRI terkait hak-hak kami sebagai karyawan. Tapi itu tidak terpenuhi, tiga kali kami adakan

bipartite dan itupun tidak terpenuhi, makanya kami lapor ke DPRD Tarakan. Aksi kemarin kami di DPRD termasuk imbas pemecatan makanya kami angkat poin itu, mengapa kami lari ke DPRD," katanya.

Senada dengan Basran, Dendi Setiawan juga mengalami hal serupa. Sedihnya, dia mengaku dipecat hanya melalui sebuah pesan WhatsApp.

Dendi Setiawan, tenaga harian subkontraktor PT Sang Jaya Indo (SJI) ini menceritakan, jika pemecatan itu dialami puluhan pekerja. Usai melakukan aksi aduan bertemu DPRD yang dia sebut sebagai musyawarah, beberapa pekerja langsung dipecat termasuk dirinya. Dia menduga alasan pemecatan karena mereka mengikuti aksi aduan ke DPRD beberapa waktu lalu.

"Begitu selesai kami diminta tanda tangan kontrak kerja, tapi setelah tanda tangan kami malah di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Namanya pemecatan itu harus ada prosedurnya, apakah ada SP-1, SP-2 dan SP-3, ini tidak ada dan pemecatan juga melalui pesan WhatsApp tidak ada surat pemecatan," ungkapnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika





Petugas Lapas Kelas IIA Tarakan saat melakukan razia kamar WBP.

ADE/MKR

## Tingkatkan Kondusifitas Kamtib, Petugas Lapas Tarakan Lakukan Tes Urin dan Razia Kamar

TARAKAN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan melakukan razia kamar hunian sekaligus test urine kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (18/10/2023) malam.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kondusifitas dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) di lingkungan Lapas Kelas IIA Tarakan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala, Andhika Abrian menuturkan, kegiatan razia penggeledahan kamar hunian WBP dilaksanakan di dua blok yang berbeda yakni blok hunian khusus wanita dan blok mapenaling/straff cell.

Dalam kegiatan itu, seluruh personil memeriksa secara seksama seluruh sudut kamar dan mengamankan sejumlah barang milik WBP di antaranya satu buah alat komunikasi handphone dan aksesoris headset, kabel listrik, korek api gas hingga tali. Namun nihil ditemukan barang terlarang seperti senjata ta-

jam dan Narkoba. Dari hasil test urine para WBP dan Pegawai berjalan secara tertib dan kondusif. Seluruh hasil test, kata dia, dinyatakan negatif dari indikasi penggunaan narkoba.

Kegiatan razia kamar hunian dan test urine WBP ini, lanjutnya, dilaksanakan sehubungan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Heri Azhari, terkait komitmen jajaran khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam meningkatkan upaya deteksi dini terhadap gangguan kamtib.

Selain itu, mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). "Malam ini kami seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Tarakan secara seksama melakukan razia kamar hunian sekaligus test urin bagi WBP dan Pegawai," terang Andhika,

Kamis (19/10/2023).

Tujuan kegiatan ini ialah implementasi dari komitmen dalam upaya deteksi dini gangguan kamtib serta wujud nyata dukungan terhadap program P4GN. Dari kegiatan ini, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang milik WBP yang terindikasi dapat menyebabkan gangguan kamtib.

"Tidak hanya razia kamar saja, kami juga telah melaksanakan test urine kepada sejumlah WBP laki-laki dan perempuan serta para pegawai oleh Tim Medis. Hasilnya, tidak ditemukan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkoba," katanya.

Melalui kegiatan ini, dia juga berharap dapat meningkatkan kondusifitas di lingkungan Lapas Kelas IIA Tarakan sehingga seluruh program pengamanan dan pembinaan dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia  
Editor: Andhika



Foto bersama reses Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman di Kampung Sei Bebanir Bangun.

## Reses III, Sakirman Tarik Minat Anak Muda jadi Petani Modern

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman melaksanakan reses III di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), Kampung Sei Bebanir Bangun pada Kamis (19/10/2023).

Dia mengungkapkan, dalam reses tersebut seluruh sektor atau instansi terkait hadir. Seperti BPP, OPD, pengelola balai benih serta kaum milenial.

Dijelaskannya, kehadiran dirinya pada pelaksanaan reses sebagai penampung aspirasi yang kemudian akan di upayakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini sebagai support system ya mereka semua, terkait bagaimana memberikan pembinaan dan pendampingan bagaimana supaya ada peningkatan," tuturnya.

Dirinya mengatakan, salah satu paparan warga terkait adanya pe-

merosotan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pertanian. Pasalnya, kurangnya minat masyarakat, khususnya kaum pemuda untuk bertani, menyebabkan turunnya populasi petani saat ini.

"Dari usia juga sudah cukup meningkat, dari 50 keatas. Makanya, tanggung jawab kita sebagai pemerintah, harus membantu dengan peralatan yang modern," jelasnya.

Hanya saja, kata dia, untuk merealisasikan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dilakukan pemetaan, daerah mana saja yang sudah dan belum mendapat bantuan tersebut.

"Ini yang harus kita petakan, dari seluruh potensi yang ada. Kira-kira sudah berapa alat yang ada dan terus apa yang kurang," paparnya.

Lanjutnya, dengan memenuhi peralatan yang modern dan memberikan

pemahaman kepada kaum pemuda, diharapkan bisa menarik minat untuk menggalakan bisnis di bidang pertanian.

"Dengan pengurangan SDM yang ada, solusinya dengan peralatan yang modern. Tapi sambil kita membina bagaimana menjadi petani yang sejahtera," ungkapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kaum muda harus lebih melek akan sektor pertanian Bumi Batiwakkal. Baik dari segi peningkatan daerah maupun segi bisnis.

"Bukan berarti kita petani bahwa kita susah, tapi dengan bertani kita juga bisa mapan. Ini yang akan diubah, nanti kita coba edukasi dengan perhitungan ekonomi yang ditawarkan dengan bersawah sekian loh penghasilannya," tandasnya. (adv/and)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah

## Minimalisir Balap Liar, Pertimbangkan Pembangunan Sirkuit

**TANJUNGREDEB** - Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mempertimbangkan pembangunan sirkuit balap motor. Hal itu dinilainya agar meminimalisir aksi balap liar yang kerap terjadi.

Dia mengungkapkan, sirkuit balap motor sudah memiliki lokasi, yakni di kawasan Kecamatan Gunung Tabur. "Tinggal proses pembangunannya

lagi yang disegerakan," ungkapnya saat ditemui awak media ini.

Dirinya menyebut, pembangunan sirkuit balap motor itu akan dilaksanakan pada 2024 mendatang, dengan alokasi anggaran yang sudah dipersiapkan. "Mudah-mudahan ke depan kita bisa anggarkan agar tidak terjadi lagi balap liar seperti yang telah terjadi di beberapa hari terakhir

ini," katanya.

Suriansyah sangat berharap agar pembangunan sirkuit balap dapat segera terealisasi sehingga masalah balap liar dapat diatasi di Berau.

"Karena memang sirkuit balap ini harus kita berikan untuk menampung hobi balap mereka, supaya tidak ada balap liar di luar, dan supaya menjaga ketertiban," pungkasnya. (adv/and)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

## Desak Pemkab Koordinasi ke Pemprov Atasi Kurangnya Jumlah SMA

**TANJUNGREDEB** – Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Berau dianggap masih kurang. Terlebih tidak ada data pasti mengenai berapa pelajar SMP yang lulus dalam setiap tahunnya.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menegaskan, jangan sampai ada kejadian yang merugikan pelajar SMP yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA.

“Apalagi pernah ada kejadian satu sekolah tidak dapat menampung pelajar, padahal masih dalam zonasi. Jangan sampai pelajar kita harus putus sekolah, karena keterbatasan ruang belajar, dan sekolah,” ungkapnya.

Dia membeberkan, Kecamatan Segah sudah meminta bantuan sekolah jenjang SMA. Namun, hingga kini belum ada terealisasi. Diketahui, tingkat SMA merupakan kewenangan dari provinsi. Tapi menurut Rudi, pe-

merintah dapat menjemput bola dan memaksa agar dibangun sekolah.

“Apalagi di Kecamatan Segah, jumlah anak-anak banyak. Tapi harus jauh ke kota untuk bisa bersekolah,” katanya.

Politikus PDI-P ini menyebut, pemerintah jangan pasrah karena kebijakan ada di provinsi. Padahal, kata dia, Pemkab Berau bisa saja mendesak provinsi untuk membangun SMA di Kecamatan Segah, terlebih hal tersebut merupakan suatu kebutuhan mendasar.

“Bagaimana bisa berjalan suatu daerah, jika SDM nya kurang pendidikan,” tuturnya.

Rudi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat memberikan data jumlah lulusan setiap tahunnya. Tujuannya agar bisa menjadi bahan pertimbangan dari provinsi dalam membangun sekolah baru.

“Paling jangka setahun membangun sekolah itu. Anggaran juga ada di

provinsi,” tambahnya.

Dirinya mengaku, nyaris setiap tahun mendengar adanya ruang belajar dan sekolah yang kurang. Namun tidak ada tindakan dari pemerintah. Untuk SMP dan SD menurutnya sudah cukup banyak, namun untuk tingkat lanjutan masih kurang.

“Di wilayah perkotaan Tanjung Re-deb memang banyak. Tapi bagaimana kabar yang ada di kecamatan lainnya,” katanya.

Kendati begitu, Rudi menganggap tidak semua semua orangtua mampu menyekolahkan anaknya jauh. Memang untuk negeri semua gratis. Namun untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya indeks, tentu membutuhkan rupiah.

“Jangan menganggap semua orangtua mampu. Kita harus berpikir juga, jadi lebih baik membangun sekolah. Saya tidak ingin penerus bangsa ini putus sekolah dan akhirnya menikah muda,” pungkasnya. (adv/and)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

## Permudah Masyarakat, Harap Perpustakaan Keliling Dioperasikan Maksimal

**TANJUNG REDEB** - Perpustakaan keliling diharapkan Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi terus beroperasi. Tentu dengan anggaran yang memadai.

Dia mengungkapkan, kehadiran perpustakaan keliling dapat memudahkan masyarakat membaca dan meminjam buku tanpa harus datang ke perpustakaan.

Dirinya membeberkan, belakangan ini perpustakaan keliling jarang dilaksanakan karena terkendala persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ini suatu kerugian juga jika tidak beroperasi. Dengan adanya perpustakaan keliling, tentu memudahkan masyarakat dalam mencari dan meminjam buku,” ucapnya.

Dinilainya, dengan adanya perpustakaan keliling sebagai upaya mendorong minat baca masyarakat. Sebab berdasarkan survei dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, indeks literasi Berau masih berada di bawah 40 persen.

“Dengan adanya mobil perpustakaan keliling tersebut, diharapkan akan membantu menumbuhkan sekaligus meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat Berau, khususnya kaum milenial sebagai generasi penerus,” katanya.

Ichsan meminta 13 kecamatan yang ada di Berau memiliki fasilitas mobil perpustakaan keliling. Sehingga, mampu membuka wawasan dalam berbagai hal dan menambah infor-

masi bagi seluruh masyarakat Berau.

“Hal itu juga dapat mengedukasi masyarakat agar gemar membaca yang juga dapat dimanfaatkan setiap waktu. Muaranya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan rajin membaca,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini juga mengapresiasi hadirnya pojok baca digital, hal itu bisa dikoneksikan dengan 1.000 titik WiFi yang disiapkan oleh Pemkab Berau.

Namun, Ichsan mengingatkan, agar program terus bisa berjalan paralel. “Harus itu, seiring sejalan. Pojok baca bisa dinikmati, begitu juga untuk WiFi-nya,” pungkasnya. (adv/and)



Suasana reses Ketua DPRD Berau, Madri Pani di Kampung Suaran.

## Reses di Kampung Suaran, Ketua DPRD Berau Terima Aspirasi Soal Jalan Usaha Tani

**TANJUNG REDEB** - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menggelar reses ke III di Kampung Suaran pada Kamis (19/10/2023) malam. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat paling banyak menyampaikan usulan mengenai sektor pertanian.

Madri mengungkapkan, masyarakat Kampung Suaran menging-

inkan adanya bantuan untuk sektor pertanian. Pasalnya, mayoritas penduduk di sana merupakan petani. "Mereka mengaku belum pernah merasakan bantuan, termasuk dari provinsi," beberny.

Selain itu, masyarakat Kampung Suaran juga menginginkan adanya pembangunan jalan usaha tani, tu-

juannya untuk mempermudah mereka membawa hasil taninya.

"Apa saja yang masyarakat butuhkan dan apabila memang bisa direalisasikan maka akan saya upayakan mendorongnya. Termasuk pembangunan jalan usaha tani yang paling banyak menjadi aspirasi malam ini," tandasnya. (adv/and)